

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan peneliti dalam melakukan penelitian sehingga peneliti dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, peneliti tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian peneliti. Namun peneliti mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan peneliti.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Agus Winasis dan Dody Setyawan pada tahun 2016 dengan judul *Efektivitas Program Pengembangan Desa Wisata Melalui Kelembagaan dalam Peningkatan Sumber Daya Alam (SDA)*. Pada penelitian ini sang peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif. Penelitian ini membahas mengenai program pengembangan desa melalui beberapa kelembagaan. Hasil penelitian efektivitas pengembangan desa wisata melalui peningkatan sumber daya alam (SDA) sudah efektif, yaitu dilakukan melalui pembentukan Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS), Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN), menjalin kerjasama dengan *Jatim Park Foundation* dan lembaga swadaya masyarakat. Teori yang dipakai sang peneliti adalah teori dari Wicaksono. Penjelasan dari

teori ini yaitu efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program, disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Makmun dan Ishardinata Trimulya Kusuma Wijaya pada tahun 2020 dengan judul Penerapan Sistem Pembayaran *Electronic Ticketing* Kepada Penumpang Kereta Commuter Line Di Stasiun Rangkasbitung. Pada penelitian kali ini sang peneliti menggunakan metode kualitatif dengan kajian deskriptif. Hasil dari penelitian ini yaitu respon masyarakat yang diterima terhadap penerapan sistem pembayaran elektronik tiket yang diterapkan oleh PT. Kereta Commuter Indonesia ini cukup diterima, karena menurut masyarakat dengan adanya elektronik tiket ini seperti misalkan ketika menggunakan kartu KMT dan Kartu Prabayar Bank itu tidak repot lagi untuk membeli tiket yang baru.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Retno Arvi Wahyuni, Putri Andinafa Augustin, Adjeng Ningtiaz Nugraheni pada tahun 2021 dengan judul Efektivitas Trans Jogja Sebagai Pelayanan Publik Di Kota Yogyakarta. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif dengan review literatur, analisis kebijakan, dan rekomendasi kebijakan. Hasil penelitian kehadiran trans jogja ini belum efektif karena banyaknya pengguna kendaraan bermotor dan sedikitnya masyarakat yang menggunakan trans jogja jadi mengakibatkan tidak seimbangna transportasi yang ada di jalan. Yang akhirnya mengakibatkan kemacetan yang semakin parah setiap tahunnya.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Agus Winasis dan Dody Setyawan. 2016	Efektivitas Program Pengembangan Desa Wisata Melalui Kelembagaan dalam Peningkatan Sumber Daya Alam (SDA)	Metode kualitatif	efektivitas pengembangan desa wisata melalui peningkatan sumber daya alam (SDA) sudah efektif, yaitu dilakukan melalui pembentukan Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS), Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN), menjalin kerjasama dengan <i>Jatim Park Foundation</i> dan lembaga swadaya masyarakat.
2.	Makmun, Ishardinata Trimulya Kusuma Wijaya. 2020	Penerapan Sistem Pembayaran <i>Electronic Ticketing</i> Kepada Penumpang Kereta Commuter Line Di Stasiun Rangkasbitung.	Metode kualitatif dengan kajian deskriptif	respon masyarakat yang diberikan terhadap penerapan sistem pembayaran elektronik tiket yang diterapkan oleh PT Kereta Commuter Indonesia ini cukup diterima, karena menurut masyarakat dengan adanya elektronik tiket ini seperti misalkan ketika menggunakan

				kartu KMT dan Kartu Prabayar Bank itu tidak repot lagi untuk membeli tiket yang baru.
3.	Retno Arvi Wahyuni, Putri Andinafa Augustin, Adjeng Ningtiaz Nugraheni. 2021	Efektivitas Trans Jogja Sebagai Pelayanan Publik Di Kota Yogyakarta	Metode kualitatif dengan review literatur, analisis kebijakan, dan rekomendasi kebijakan	Kehadiran trans jogja ini belum efektif karena banyaknya pengguna kendaraan bermotor dan sedikitnya masyarakat yang menggunakan trans jogja jadi mengakibatkan tidak seimbangnya transportasi yang ada di jalan. Yang akhirnya mengakibatkan kemacetan yang semakin parah setiap tahunnya.

2.2 Kerangka Konsep dan Teori

Penelusuran pustaka harus meninjau setiap masalah dalam penelitian sehingga dapat membantu diskusi dan menyelesaikan masalah sepenuhnya. Hal ini mungkin terkait dengan pemanfaatan berbagai sumber pustaka terkait masalah penelitian. Seperti, dari buku teks, laporan penelitian, jurnal, dan sumber media massa lainnya.⁵ Susunan penelitian yang baik harus mencakup tinjauan dan kajian bahan pustaka. Pada bab ini peneliti memaparkan teori serta konsep yang berkaitan dengan penelitian yang peneliti lakukan.

⁵ Moh. Kasiram, Metode Penelitian (Yogyakarta: UIN Maliki Press, 2008), hal 103.

2.2.1 Teori Kebijakan Publik

Kebijakan merupakan serangkaian rencana program, aktivitas, aksi, keputusan, serta sikap untuk bertindak maupun tidak bertindak yang dilakukan oleh para pihak yaitu *stakeholders*. Penetapan kebijakan merupakan faktor penting bagi organisasi untuk penyelesaian masalah dan mencapai tujuan.

Kebijakan bisa berasal dari seorang pelaku atau sekelompok pelaku yang memuat serangkaian program, aktivitas, atau tindakan dengan tujuan tertentu. Kebijakan diikuti dan dilaksanakan oleh para pelaku (*stakeholders*) dalam rangka memecahkan suatu permasalahan tertentu.⁶ Proses kebijakan dapat dijelaskan sebagai suatu sistem, yang meliputi *input*, proses, dan *output*. *Input* kebijakan merupakan isu kebijakan atau fenomena yang terjadi, sedangkan proses kebijakan berwujud perumusan formulasi kebijakan dan pelaksanaan kebijakan. Isu dan formulasi kebijakan dapat dipahami sebagai proses politik yang dilakukan elit politik dan atau kelompok-kelompok penekan sedangkan *output* dari proses kebijakan adalah kinerja kebijakan, oleh karena itu, kebijakan tidak bersifat permanen.

Kebijakan dibuat sekali untuk rentang waktu tertentu sebagai sebuah solusi atas permasalahan yang ada dan kepentingannya melayani. Tujuan kebijakan publik adalah seperangkat tindakan pemerintah yang didesain untuk mencapai

⁶ Haerul, Haedar Akib, Hamdan . 2016. Jurnal Administrasi Publik, Volume 6 No. 2. Hal : 21-34.

hasil tertentu yang diharapkan oleh publik sebagai konstituen pemerintah.

Kebijakan Publik Sebagai pilihan tindakan yang legal dan sah karena kebijakan publik dibuat oleh lembaga yang memiliki legitimasi dalam sistem pemerintahan. Kemudian kebijakan publik sebagai hipotesis adalah kebijakan yang dibuat berdasarkan teori, model atau hipotesis mengenai sebab akibat. Kebijakan senantiasa bersandar pada asumsi mengenai perilaku. Sebagai pilihan tindakan yang legal dan sah karena kebijakan.

Berdasarkan beberapa pendapat diatas, kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan yang sadar, terarah, dan terukur yang dilakukan oleh pemerintah dan melibatkan para pihak yang berkepentingan dalam bidang-bidang tertentu yang mengarah pada tujuan tertentu. Sehingga untuk efektivitas kebijakan publik diperlukan kegiatan sosialisasi, pelaksanaan, serta pengawasan kebijakan. Pembahasan kebijakan publik juga tidak bisa lepas dari usaha untuk melaksanakan kebijakan publik tersebut.

Ada beberapa teori kebijakan yang nantinya akan mempengaruhi pelaksanaan kebijakan publik, diantaranya:⁷

1) Teori Merilee S. Grindle

Pelaksanaan kebijakan publik dalam teori Merilee S. Grindle dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni: isi

⁷ Subarsono. 2011. Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi. Jogjakarta : Pustaka Pelajar. Hal : 94

kebijakan (*content of policy*); dan lingkungan implementasi (*context of implementation*). Variabel tersebut mencakup sejauh mana kepentingan kelompok sasaran tertuang dalam isi kebijakan; jenis manfaat yang diterima oleh kelompok sasaran; sejauhmana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan; apakah penempatan lokasi program sudah tepat; apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan pelaksanaannya secara detail; dan apakah sebuah program didukung oleh sumber daya yang memadai.

2) Teori Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier

Teori ini menyebut ada tiga kelompok variabel yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan publik, yaitu: karakteristik dari masalah (*tractability of the problems*), karakteristik kebijakan atau Undang-Undang (*ability of statute to structure implementation*), dan variabel lingkungan (*nonstatutory variables affecting implementation*).

3) Teori Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn

Teori mereka menyatakan paling tidak dijumpai lima variabel yang mempengaruhi kinerja pelaksanaan kebijakan publik, yakni: standar dan sasaran kebijakan; sumberdaya; komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas;

karakteristik agen pelaksana; dan kondisi sosial, ekonomi dan politik.

2.2.2 Pelaksanaan Kebijakan Publik

Pelaksanaan kebijakan publik merupakan rangkaian kegiatan setelah suatu kebijakan dirumuskan dan ditetapkan.

Pelaksanaan kebijakan mengacu pada mekanisme, sumber daya, dan hubungan terkait dengan pelaksanaan program kebijakan. Tanpa pelaksanaannya, kebijakan yang telah ditetapkan akan sia-sia. Oleh karena itu, pelaksanaan kebijakan mempunyai kedudukan yang penting dalam kebijakan publik, sehingga pelaksanaan kebijakan dapat dimaknai sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan, baik oleh individu maupun kelompok pemerintah yang diorientasikan pada pencapaian serta tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Implikasi dari pelaksanaan kebijakan merupakan konsekuensi yang muncul sebagai akibat dari dilaksanakannya kebijakan-kebijakan tersebut. Hasil evaluasi pada pelaksanaan kebijakan dapat menghasilkan dampak yang diharapkan (*intended*) atau dampak yang tidak diharapkan (*spillover negative effect*).

2.2.3 Konsep Efektivitas Program

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris *effective* artinya berhasil, sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik.⁸ Konsep efektivitas merupakan konsep yang luas, mencakup berbagai faktor di dalam maupun di luar organisasi.⁹

Efektivitas ditinjau dari sudut pencapaian tujuan, dimana keberhasilan suatu organisasi harus mempertimbangkan bukan saja sasaran organisasi tetapi juga mekanisme mempertahankan diri dalam mengejar sasaran.¹⁰ Efektivitas sendiri merupakan kemampuan untuk memilih tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran yang tepat dan mencapainya. Karena itu efektivitas menunjuk pada kaitan antara *output* atau apa yang sudah dicapai atau hasil yang sesungguhnya dicapai dengan tujuan atau apa yang sudah ditetapkan dalam rencana atau hasil yang diharapkan.

Dalam setiap pelaksanaan, faktor efektivitas selalu menjadi dasar utama pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini karena efektivitas merupakan alat pengukur tingkat keberhasilan suatu organisasi dalam melaksanakan kegiatan, program atau kebijakannya dalam rangka pencapaian suatu tujuan. Bagi seorang ahli ekonomi atau analisis keuangan, efektivitas organisasi adalah keuntungan atau laba investasi. Bagi manajer produksi, efektivitas merupakan kuantitas atau kualitas keluaran (*output*) barang atau

⁸ Moh. Pabundu Tika, *Budaya Organisasi dan Peningkatan Kinerja Perusahaan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2014, h. 129.

⁹ Donni Juni Priansa, dan Agus Garnida, *Manajemen Perkantoran Efektif, Efisien, dan Profesional*, Bandung: Alfabeta, 2013, h. 11.

¹⁰ Georgopolous dan Tannembaum (1985) *Efektivitas Organisasi*. Jakarta: Erlangga. Hal:50

jasa. Bagi seorang ilmuwan bidang riset, efektivitas dijabarkan dengan jumlah paten, penemuan, atau produk baru suatu organisasi. Dan bagi sejumlah sarjana ilmu sosial, efektivitas seringkali ditinjau dari sudut kualitas kehidupan pekerja.¹¹

Efektivitas sesungguhnya merupakan suatu konsep yang luas, mencakup berbagai faktor didalam maupun diluar organisasi.

Efektivitas secara umum menunjukkan seberapa jauh tercapainya suatu tujuan yang terlebih dahulu ditentukan. Efektifitas berasal dari kata “efek” dan digunakan istilah ini sebagai hubungan sebab akibat. Efektivitas dapat dipandang sebagai suatu sebab akibat dari variabel lain.¹² Efektivitas ,merupakan salah satu dimensi dari produktivitas, yaitu mengarah kepada pencapaian untuk kerja yang maksimal, yaitu pencapaian target yang berkaitan dengan kualitas, kuantitas dan waktu.

Selain itu, yang mendasari dari efektivitas adalah tujuan yang ingin dicapai sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Meskipun upaya tersebut telah dilakukan oleh pemerintah, namun realitas pelayanan publik belum juga menunjukkan perubahan yang signifikan. Banyaknya keluhan dan pengaduan dari masyarakat menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik sangat rendah. Pengaduan dan keluhan tentang prosedur pelayanan yang berbelit, tidak adanya kepastian dan jangka waktu penyelesaian, biaya yang sangat mahal, persyaratan

¹¹ Richard M. Strees. 1996. *efektivitas* organisasi Jakarta: PT Gunung Agung, cet ke-1, h. 1

¹² Pasolong, Harbani, 2007, Teori Administrasi Publik, Bandung:Alfabeta. Hal : 142-143

yang tidak transparan, sikap petugas pelayanan yang kurang responsif sering ditemui dan hampir merata dalam semua bidang pelayanan pemerintah saat ini.

Kata program dalam bahasa Inggris berarti acara. Dalam kamus Bahasa Indonesia kata program berarti rancangan mengenai asas-asas serta usaha-usaha yang dijalankan. Kegiatan merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri atas sekumpulan tindakan.

Setiawan (2015:17) mengemukakan, Program yaitu rancangan mengenai asas serta usaha (dalam ketatanegaraan, perekonomian, dsb) yang akan dijalankan.

Konsep program dalam kebijakan publik dibuat untuk menentukan tindakan tertentu dalam rangka menetapkan tujuan, dilanjutkan dengan proses pelaksanaan pengembangan rencana, sekaligus pengimplementasian dan diakhiri dengan mengevaluasi program untuk menyusun program berikutnya.¹³

Jones (1991:296) mengemukakan bahwa program adalah cara yang disahkan untuk mencapai tujuan. Di dalam program dibuat beberapa aspek, mengenai tujuan kegiatan yang akan dicapai, kegiatan yang diambil dalam mencapai tujuan, aturan yang harus dipegang dan prosedur yang harus dilalui, diperkirakan

¹³ Dr. Sri Setyowati. Kebijakan Pendidikan Sebelum dan Sesudah Tahun 1980. 2016. Hal:13

anggaran yang dibutuhkan serta diperlukannya strategi pelaksanaan.¹⁴

Program merupakan pernyataan yang berisi kesimpulan dari beberapa harapan atau tujuan yang saling bergantung dan saling terkait, untuk mencapai suatu sasaran yang sama, biasanya suatu program mencakup seluruh kegiatan yang berada di bawah unit administrasi yang sama, atau sasaran yang saling bergantung dan saling melengkapi dimana semuanya harus dilaksanakan secara bersamaan atau berurutan. Program sering dikaitkan dengan perencanaan, persiapan, dan rancangan.

Berdasarkan pembahasan diatas, dapat disimpulkan efektivitas program adalah kemampuan untuk memilih tujuan dengan memanfaatkan sarana dan prasarana melalui suatu prosedur atau cara yang disahkan dengan memperkirakan anggaran serta strategi yang diperlukan dalam mencapai tujuan.

Penilaian terhadap tingkat kesesuaian program merupakan salah satu cara untuk mengukur efektivitas program. Setiawan (1998:21) menyebutkan efektivitas program dapat diketahui dengan membandingkan tujuan program dengan *output* program. Sementara itu pendapat penyelenggara serta pengguna program dapat dijadikan sebagai ukuran untuk menentukan efektivitas program dalam evaluasi terhadap efektivitas program yang dapat dilakukan melalui reaksi pengguna terhadap program yang diikuti.

¹⁴ [http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/16480/4/Chapter % 2011.pdf](http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/16480/4/Chapter%2011.pdf). diakses 06 Agustus 2022.

2.2.4 Pendekatan Efektivitas

Pendekatan efektivitas digunakan untuk mengukur sejauh mana aktifitas itu efektif. Ada beberapa pendekatan yang digunakan terhadap efektivitas yaitu:

1.) Pendekatan sasaran (*Goal Approach*)

Price (1972:15) mengemukakan bahwa pendekatan sasaran dalam efektivitas yaitu pendekatan yang mengukur sejauh mana suatu lembaga berhasil mewujudkan sasaran yang hendak dicapai. Pendekatan sasaran dimulai dengan identifikasi sasaran organisasi dan mengukur tingkat keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran. Sasaran yang perlu untuk diperhatikan dalam pengukuran efektivitas dengan pendekatan ini yaitu sasaran yang realistis guna memberikan hasil maksimal berdasarkan sasaran resmi "*Official Goal*" dengan memperhatikan permasalahan yang dikeluarkan, dengan memusatkan perhatian kepada aspek *output* yaitu dengan mengukur keberhasilan program dalam mencapai tingkat *output* yang direncanakan.

Dengan demikian, pendekatan sasaran mencoba mengukur sejauh mana organisasi atau lembaga berhasil mewujudkan sasaran yang hendak dicapai.

2.) Pendekatan Sumber (*System Resource Approach*)

Pendekatan sumber mengukur efektivitas melalui keberhasilan suatu organisasi dalam memperoleh berbagai sumber yang dibutuhkannya. Suatu organisasi harus dapat memperoleh sumber dan juga memelihara keadaan agar tetap efektif. Pendekatan ini berdasar kepada teori mengenai keterbukaan sistem suatu organisasi terhadap lingkungannya, karena organisasi mempunyai hubungan yang erat dengan lingkungan, dimana dari lingkungan tersebut diperoleh sumber yang seringkali bersifat langka dan bernilai tinggi.

3.) Pendekatan Proses (*Internal Process Approach*)

Pendekatan proses menganggap sebagai efisiensi dan kondisi kesehatan dan suatu lembaga internal. Pada lembaga yang efektif, proses internal berjalan dengan lancar dimana kegiatan bagian-bagian yang ada berjalan secara terkoordinasi.

Cunningham (1978:635) mengemukakan bahwa pendekatan proses tidak memperhatikan lingkungan melainkan memusatkan kepada perhatian terhadap kegiatan yang dilakukan terhadap sumber-sumber yang dimiliki organisasi, yang menggambarkan tingkat efisiensi serta kesehatan organisasi.

2.2.5 Aspek-aspek Yang Memengaruhi Efektivitas

Aspek-aspek efektivitas dapat dijelaskan bahwa efektivitas merupakan suatu program dapat dilihat dari aspek-aspek antara lain:¹⁵

1. Aspek tugas atau fungsi, yaitu lembaga dikatakan efektivitas jika melaksanakan tugas atau fungsinya, begitu juga suatu program pembelajaran akan efektif jika tugas dan fungsinya dapat dilaksanakan dengan baik dan peserta didik belajar dengan baik;
2. Aspek rencana atau program, yang dimaksud dengan rencana atau program disini adalah rencana pembelajaran yang terprogram, jika seluruh rencana dapat dilaksanakan maka rencana atau program dikatakan efektif;
3. Aspek ketentuan dan peraturan, efektivitas suatu program juga dapat dilihat dari berfungsi atau tidaknya aturan yang telah dibuat dalam rangka menjaga berlangsungnya proses kegiatannya. Aspek ini mencakup aturan-aturan baik yang berhubungan dengan guru maupun yang berhubungan dengan peserta didik, jika aturan ini dilaksanakan dengan baik berarti ketentuan atau aturan telah berlaku secara efektif; dan
4. Aspek tujuan atau kondisi ideal, suatu program kegiatan dikatakan efektif dari sudut hasil jika tujuan atau kondisi ideal

¹⁵ Muasaroh, Latifatul. 2010. Aspek – Aspek Efektivitas. Hal : 13

program tersebut dapat dicapai. Penilaian aspek ini dapat dilihat dari prestasi yang dicapai oleh peserta didik.

2.2.6 Pengukuran Efektivitas

Mengukur efektivitas program bukanlah suatu hal yang sangat sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikannya. Bila dipandang dari sudut produktivitas, maka seorang atasan memberikan pemahaman bahwa efektivitas berarti kualitas dan kuantitas (output) barang dan jasa.

Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif.

Adapun kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak, sebagaimana dikemukakan oleh S. P. Siagian (1978:77), yaitu:

- 1.) Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksudkan supaya karyawan dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai.
- 2.) Kejelasan strategi pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa strategi adalah "pada jalan" yang diikuti dalam melakukan

berbagai upaya dalam mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan agar para implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi.

3.) Proses analisis dan perumusan kebijakan yang siap, berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan artinya kebijakan harus mampu menjembatani tujuan-tujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional.

4.) Perencanaan yang matang, pada hakekatnya berarti memutuskan sekarang apa yang dikerjakan oleh organisasi di masa depan.

5.) Penyusunan program yang tepat suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat sebab apabila tidak, para Pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja.

6.) Tersedianya sarana dan prasarana kerja, salah satu indikator efektivitas organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif. Dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi.

7.) Pelaksanaan yang efektif dan efisien, bagaimanapun baiknya suatu program apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi tersebut tidak akan mencapai sasarannya, karena dengan Pelaksanaan organisasi semakin didekatkan pada tujuannya.

8.) Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik mengingat sifat manusia yang tidak sempurna maka efektivitas organisasi menuntut terdapatnya sistem pengawasan dan pengendalian.

Budiani (2007), mengemukakan beberapa indikator dalam teori efektivitas yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat efektivitas suatu program, diantaranya adalah:¹⁶

1. Ketepatan sasaran program, Ketepatan sasaran program, Makmur (2011:8) mengemukakan bahwa

“ketepatan sasaran program berguna untuk mengukur peserta program yang tepat. Ketepatan sasaran lebih berorientasi kepada jangka pendek dan lebih bersifat operasional, penentu sasaran yang tepat baik ditetapkan secara individu maupun sasaran yang ditetapkan organisasi sesungguhnya sangat menentukan keberhasilan aktivitas organisasi. Demikian pula sebaiknya, jika sasaran yang ditetapkan itu kurang tepat maka akan menghambat pelaksanaan berbagai kegiatan itu sendiri.”

2. Sosialisasi program, Wilcox dalam Mardikonto (2013:86) mengemukakan bahwa

“sosialisasi program mengukur kemampuan penyelenggara dalam melakukan sosialisasi mengenai program, sehingga informasi mengenai pelaksanaan program tersampaikan kepada sasaran program, memberikan informasi merupakan langkah awal yang dilakukan untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal dan memperlancar dalam melanjutkan suatu pekerjaan, karena dengan memberikan informasi dapat dipergunakan dan meningkatkan pengetahuan bagi orang yang menerima informasi tersebut.”

3. Tujuan program menurut Duncan dalam Streers adalah sejauh mana kesesuaian antara hasil program dengan tujuan program

¹⁶ Sugiyono dalam Budiani . 2007. Dalam Jurnal Ekonomi Sosial. Hal 53

yang telah ditetapkan sebelumnya. Duncan dalam Streers (1985:53) juga mengemukakan

“pencapaian tujuan adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin 30 terjamin, diperlukan pentahapan baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti perodesasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor yaitu: kurun waktu dan sasaran yang merupakan target yang kongkrit.”

4. Pemantauan program, Winardi (2010:7) mengemukakan

“pemantauan program mengukur bagaimana program setelah dilaksanakan dan diterapkan oleh regulator seagai bentuk perhatian kepada para peserta program. pengawasan meliputi tindakan mengecek dan membandingkan hasil yang dicapai dengan standar-standar yang telah digariskan. Apabila hasil yang dicapai menyimpang dari standar yang berlaku perlu dilakukan tindakan korektif untuk memperbaikinya.

Bohari (1992:3) juga mengemukakan bahwa pengawasan merupakan pengukuran pemeriksaan atau pengontrolan dari pihak yang regulator kepada sasaran.

Siagian dalam Situmorang Dkk (1993:19) menyebutkan bahwa

“pengawasan merupakan proses pengamatan dari hasil serta pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang sebelumnya telah ditetapkan.”

2.2.7 Konsep Transportasi Publik

Menurut Nasution (2004), transportasi publik merupakan suatu barang yang dibutuhkan manusia untuk berpergian dari satu

tempat ke tempat yang lain dengan tujuan mengambil bagian di dalam suatu kegiatan, misalnya bekerja, berbelanja, dll.

Transportasi publik mempunyai dua peran utama, yaitu sebagai alat bantu untuk mengarahkan pembangunan di daerah perkotaan dan sebagai prasarana bagi pergerakan manusia dan atau barang yang timbul akibat adanya kegiatan di daerah perkotaan.¹⁷ Peran pertama sering digunakan oleh perencana pengembang wilayah untuk dapat mengembangkan wilayahnya, misalnya saja akan dikembangkan suatu wilayah baru dimana pada wilayah tersebut tidak akan pernah ada peminatnya bila wilayah tersebut tidak disediakan sistem prasarana transportasi. Peran prasarana transportasi yang kedua, yaitu untuk mendukung pergerakan manusia dan barang dimana prasarana transportasi akan menjadi penting untuk aksesibilitas menuju wilayah dan akan berdampak pada tingginya minat masyarakat untuk menjalankan kegiatan ekonomi.

Fenomena mengenai persoalan transportasi publik di kota-kota besar di Indonesia saat ini tidak dapat diselesaikan secara teknis saja. Pergeseran pola perilaku masyarakat dengan adanya transportasi publik seperti transjakarta, *commuter line*, MRT, LRT, dll dapat dimaknai sebagai suatu perubahan dalam pemilihan moda transportasi oleh masyarakat. Bagi pengguna jasa transportasi dengan adanya transportasi publik berarti ada

¹⁷ Tamin, O.Z. 1997. Perencanaan dan Pemodelan Transportasi, dalam Jurnal Teknik Sipil : Institut Teknologi Bandung. Hal:5

perubahan yang menyangkut pada pola mobilitas penduduk serta pola perilaku bertransportasi.

Bagi pemerintah, penyelenggaraan transportasi publik berarti adanya pemerintah membuat kebijakan untuk pengadaan transpor itu mulai dari yang bersifat teknis, sosiologis hingga politis, seperti pengadaan lahan, penataan ruang, modal, dan sebagainya. Ini berlanjut pada interaksi pemerintah dengan kekuatan kapital. Untuk membangun sistem transportasi publik berkelanjutan perlu adanya revitalisasi dalam semua aspek yang berkaitan dengan transportasi publik. Pemerintah kota berperan penting dalam membuat perencanaan dan implementasi kebijakan transportasi publik. Berbagai kebijakan yang mempengaruhi masalah transportasi harus diharmonisasikan, sehingga keduanya dapat berjalan seiring, misalnya, program untuk mendorong penggunaan transit massa dan mengurangi perjalanan dengan mobil berpenumpang satu (*single-occupant car travel*).

Hal penting lainnya adalah meningkatkan integrasi transportasi dan perencanaan pemanfaatan lahan. Peningkatan dalam elemen tunggal dan terpisah dari sistem transit atau rencana transportasi, jarang memiliki pengaruh yang kuat. Sedangkan pendekatan sistematis dapat memunculkan energi untuk memperkuat sistem transportasi dan memperbaikinya.

2.3 Kerangka Berpikir

Efektivitas program dapat diartikan bagaimana suatu keadaan dapat menunjukkan tingkat keberhasilan atau pencapaian suatu tujuan yang diukur dengan beberapa indikator berdasarkan beberapa masalah yang terjadi sesuai yang telah direncanakan sebelumnya.

Dalam penelitian kali ini, peneliti menggunakan Teori Pengukuran Efektivitas Budiani (2007) sebagai teori utama. Teori Pengukuran Efektivitas Budiani (2007) menyatakan bahwa efektivitas suatu program dapat disimpulkan dengan menggunakan 4 indikator, yaitu:

1. Ketepatan sasaran program;
2. Sosialisasi program;
3. Tujuan program;
4. Pemantauan program.

Teori Pengukuran Efektivitas Budiani (2007) yang telah dikemukakan dalam kerangka teori dan dipaparkan oleh peneliti diatas merupakan acuan untuk mendukung materi pembahasan dalam pelaksanaan efektivitas program transaksi non tunai sebagai alat pembayaran *commuter line* (KRL) selama masa pandemi di Stasiun Bekasi.

Gambar 2.1
Kerangka Berpikir

